

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil - Hasil Penelitian Terdahulu

Alqodri (2015) Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai. Pengambilan sampel (sampling method) terhadap responden dilakukan secara purposive. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pejabat/aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan Daerah yaitu kepala dan pelaksana teknis setiap SKPD, dan oleh jumlah seluruh SKPD yang berada pada Pemerintah Kota Dumai sebanyak 33 orang maka sampel sebanyak 62 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel akuntabilitas keuangan (X1) signifikan. Ini menunjukkan adanya pengaruh positif akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan. Sedangkan hasil t test Tabel 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif pengawasan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Sementara hipotesis 3 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif penyajian laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan dengan signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

Putra (2017:163) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari 15 Dinas dan 8 Badan. Metoda pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Populasi yang menjadi sampel yaitu kepala sub bagian keuangan dan dua orang staf sub bagian keuangan satuan perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi jumlah sampel adalah 82 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh pada keuangan akuntabilitas manajemen keuangan. Sementara uji t untuk jawab hipotesis 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif terhadap keuangan kontrol area manajemen keuangan dengan signifikansi. Ini menunjukkan bahwa bidang pengawasan keuangan berpengaruh positif

manajemen keuangan. Sedangkan uji t untuk menjawab hipotesis 3 menunjukkan bahwa ada efek positif dari transparansi anggaran pada manajemen keuangan. Ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif pada anggaran transparansi, manajemen keuangan.

Hanafiah, (2016) Unit analisis yang digunakan adalah tingkat organisasi yaitu 63 SKPK pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik kuesioner dan dokumentasi. Data yang diambil atau diwawancarai untuk 1 SKPK 3 responden diantaranya Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran di 63 SKPD dengan jumlah responden 189. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai koefisien regresi β_i ($i=1,2,3,4$) $\neq 0$, artinya dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, dan pengawasan intern berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi (R) sebesar 0,693 menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi) antara variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 69,3%. Artinya akuntabilitas, transparansi, kapasitas SDM, dan pengawasan intern mempunyai hubungan dengan pengelolaan keuangan Daerah sebesar 69,3%.

Sriwijayanti (2018) Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang bertugas melaksanakan APBD pada seluruh dinas Pemerintah Kota Padang yang berjumlah 131 orang. Adapun Teknik dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99 orang. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus slovin. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan akan mengacu pada prinsip *Value for money*.

Hehanussa (2015) Populasi penelitian ini yaitu pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Sampel penelitian ini sebanyak 82 orang responden yang terdiri dari pegawai Pemkot Ambon. Hasil pengujian juga membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan Daerah dan aksesibilitas laporan

keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.

Syahudin Abi *et al*, (2018:230) *Determinant Of Regional Financial Management Accountability And Its Consequences To The Stakeholder Trust: A Study At Regional Government In Dompu, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan regional pengawasan pelaksanaan Pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan Daerah manajemen, diikuti dengan menguji pengaruh akuntabilitas keuangan Daerah manajemen menuju kepercayaan pemangku kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian penjelasan. Pengambilan sampel di Penelitian ini menggunakan metoda simpel random sampling dengan pertimbangan bahwa responden adalah karyawan dan memiliki reputasi sebagai pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jumlah sampel adalah 36 responden terdiri dari 18 responden dari pemangku kepentingan internal dan 18 responden dari pemangku kepentingan eksternal. Metoda analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah Analisis Partial Least Square.

A.Djalil *et al*, (2017:4864) *The Effect Of Monitoring Information System And Government Accounting Standard On Quality Of Regional Financial Report Of Government Agencies (SKPK) At Central Aceh District, Province Of Aceh, Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pemantauan, sistem informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di badan Pemerintah kabupaten (SKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sensus, di mana semua populasi diambil sebagai responden penelitian. Populasi penelitian adalah 30 SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. Responden penelitian adalah pengguna anggaran, manajer proyek (PPK) dan bendahara pengeluaran di SKPK Aceh Tengah.. Metoda analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak Aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan, sistem informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik secara simultan dan sebagian memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan lokal di SKPK Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap implementasi Pemerintah Daerah secara parsial positif dan signifikan

pengaruh terhadap akuntabilitas manajemen keuangan Daerah. Demikian pula dengan akuntabilitas manajemen keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial menuju kepercayaan pemangku kepentingan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia, dokumen anggaran Daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu Daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan Daerah (UU RI No 15 Tahun 2013).

Menurut Halim (2012: 10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan menurut Badrudin (2012: 97) : APBD adalah suatu rencana kerja Pemerintah Daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran Pemerintah Daerah, baik provinsi, kabupaten, dan Kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah :

1. Rencana kegiatan suatu Daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Dalam Pasal 79 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Jo Pasal 3 Serta 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Jo Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menggemukakan, Bahwa terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah. Meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi Daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

kelompok PAD dipisahkan menjadi:

- Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Bagian Laba Usaha Daerah
 - Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah (otonom) sebagai salah satu wujud dari komitmen antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Dana perimbangan terdiri atas 4 yaitu:
 - Bagi Hasil Pajak (Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.) dan Bukan Pajak (provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).

- Dana Alokasi Umum (DAU) atau disebut juga *General Allocation Grant* adalah Dana Perimbangan yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 Pasal 29 Proporsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini tentunya untuk menjamin tercapainya standar pelayanan *publik minimum* diseluruh negeri.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Berdasarkan UU NO. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Pasal 39 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Daerah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam APBN.
 - Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk Daerah Kota/Kabupaten..
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan Daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti :
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
 - Jasa giro
 - Pendapatan bunga
 - Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
 - Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU 33 tahun 2004). Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah (PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan). Meliputi:

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal.
- f. Bunga.
- g. Subsidi.
- h. Hibah.
- i. Bantuan Sosial.
- j. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- k. Belanja Tidak Terduga.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah. Meliputi:

- Penerimaan
- Pengeluaran

2.2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah itu sendiri adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua(PSAP BA) 02 dalam paragraph 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (Tanjung, 2004:48):

1. Laporan Realisasi Anggaran

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2007 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrua. Namun dalam penyusunan laporan realisasi 16 anggaran tetap disesuaikan dengan menggunakan basis kas (PSAP BA 02 paragraph 03 dan 04). Struktur laporan realisasi anggaran yang menyajikan informasi realisasi a) pendapatan-LRA, b) belanja, c) transfer, d) surplus/defisit-LRA e) pembiayaan dan f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). Masing-masing dari struktur laporan realisasi anggaran tersebut di definisikan dalam PSAO BA 02 paragraph 07 sebagai berikut,(Tanjung, 2014:49-50):

- a. Pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum Daerah/Negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah tidak perlu bayar kembali ke Pemerintah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum Negara/ Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah tidak perlu dibayar kembali ke Pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran dari satuan entitas pelapor/kepada entitas pelaporan lainnya termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- d. Surplus/defisit –LRA adalah selisilebih kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.
- e. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama di maksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- f. (SILPA/SIKPA) adalah selisi kurang/lebih antaran realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam PSAPBA 01 paragraf 14 dijelaskan bahwa pelaporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut (tanjung 2014:52): saldo anggaran lebih awal; pengguna saldo anggaran lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun belanja, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain lain dan saldo anggaran lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalah dan dari mana manfaat dan/atau sosial dimasa depan diharapkan di peroleh, baik Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termaksud sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masalah yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi Pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban Pemerintah.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional adalah salah satu laporan yang harus di susun oleh Pemerintah Daerah setelah di keluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Manfaat di susunnya laporan operasional ini yaitu tersedianya informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Terdapat unsur-unsur yang terdapat di dalam Laporan Operasional yaitu:

- Pendapatan laporan operasional adalah hak Pemerintah yang di akui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
- Beban adalah kegiatan Pemerintah yang di akui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
- Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelapor dari/kepada entitas pelapor lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi operasi ,tidak di harapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau yang disebut juga sebagai *cash flow statement* adalah sebuah laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan dalam satu periode tertentu. Adapun unsur yang terdiri dalam laporan arus kas yaitu:

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum negara/Daerah.
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang di susun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan atau menyajikan hal hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelapor dan entitas akuntansi.
- b. Menyediakan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi akuntansi.
- c. Menyediakan ikhtisar pencapaian target keangan selama tahun pelaporan berikut kendala yang di hadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyediakan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk di terapkan atas transaksi transaksi dan kejadian kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing masing pos yang di sajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan .
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak di sajikan dalam muka laporan keuangan.

2.2.3. Akuntabilitas Keuangan

Pengertian akuntabilitas menurut Teguh Arifiyadi (2008) adalah kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelal sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya kemudian dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Mahmudi (2010) adalah kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2003) akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Simbolon (2006) akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang dimiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, Modul I 2000:43) yaitu sebagai berikut :

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen dalam bentuk pemutakhiran metoda dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas juga dibedakan menjadi beberapa macam atau tipe, Jabra & Dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2007:50) mengemukakan ada lima perspektif akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas Administratif/Organisasi

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

2. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas jenis ini merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Akuntabilitas Politik

Dalam tipe ini terkait dengan adanya kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber-sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggung jawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

4. Akuntabilitas Profesional

Adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik di akuntabilitas Profesional. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas ini berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinana kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.2.4. Transparansi

Pengertian transparansi menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja (2003 :261) transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas setara Pemerintah dengan rakyat. Sedangkan menurut Mardiasmo dan Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi :

1. Informatif

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Keterbukaan

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

3. Pengungkapan

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktivitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

- b. Bentuk Perencanaan Dan Hasil
- c. Serangkaian Tindakan Untuk Mencapai Hasil Yang Diinginkan.
- d. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

2.2.5. Pengawasan

Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Menurut S.P Siagian (2004:40) Mengawasi berarti mengamati dan memantau dengan berbagai cara seperti pengamatan langsung kegiatan-kegiatan operasional dilapangan, membaca laporan dan berbagai cara lainnya sementara kegiatan operasional sedang berlangsung maksudnya ialah untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan terdapat penyimpangan disengaja atau tidak dari rencana dan program yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Marigan Masry Simbolon (2004:65) teknik pengawasan ada dua macam yaitu :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manejer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari :

- a. Laporan tertulis dan
- b. Laporan Lisan

Menurut Yohanes Yahya (2006:135-137) mengemukakan tentang proses pengawasan biasanya paling sedikit terdiri dari 5 tahap yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (perancangan)

Sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standard yang lebih khusus antara lain target penjualan, anggaran, bagian pasar, margin keuntungan, keselamatan kerja dan sasaran produk.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standard sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata, oleh karna dalam tahap kedua mengukur dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaan dapat diukur dalam setiap jam, harian, mingguan serta bulanan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proses diatas dilakukan maka tahapan berikutnya adalah penjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standard dan Analisa Penyimpangan

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistim yang standard ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam hal dana.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Apabila Diperlukan

Bila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan koreksi itu harus segera diambil.

2.2.6. Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan pernyataan dalam PSAK No. 1 adalah menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) yang selanjutnya disebut “Laporan Keuangan” agar dapat dibandingkan, baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan lain.

Penyajian laporan keuangan mensyaratkan pertimbangan dan estimasi pada setiap transaksi. Penjelasan mengenai penggunaan kebijakan akuntansi dan dasar estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan disyaratkan dalam pembuatan laporan keuangan. Karakteristik umum dalam PSAK 1:

1. Penyajian Secara Wajar dan Kepatuhan terhadap SAK

Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar apabila memenuhi SAK yang terkait. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas untuk:

- a. memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan PSAK 25. “Dimana PSAK 25 mengatur mengenai Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan kesalahan. Untuk pengertian yang lebih lanjut anda dapat membaca PSAK 25 secara penuh dalam bukunya”.
- b. menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan mudah dipahami.

- c. memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan khusus dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. “seperti; menambahkan informasi mata uang yang digunakan, menggunakan kurs apa?, dan menjelaskan dan memaparkan semua kejadian yang berkaitan dengan hukum yang mungkin sedang dihadapi, dll”.

2. Kelangsungan Usaha

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, mengungkapkan fakta jika terjadi pelanggaran asumsi. Disini merupakan tugas manajemen untuk membuat suatu penilaian tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usaha suatu perusahaan.

3. Dasar Akrua

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

4. Materialitas dan Agregasi

Dalam penentuan apakah suatu transaksi perlu untuk kita ungkapkan atau tidak, kita dapat melihat suatu transaksi itu dari material atau tidak. Jika tidak material kita boleh untuk tidak mengungkapkan transaksi tersebut. Dimana dalam PSAK No. 1 ini mengatakan bahwa “Entitas tidak diperlukan untuk memberikan pengungkapan khusus yang diminta oleh suatu PSAK jika informasi tersebut tidak material”.

5. Saling Hapus

Entitas tidak boleh melakukan saling hapus atas aset dan liabilitas atau pendapatan atau beban, kecuali disyaratkan atau diijinkan oleh suatu PSAK.

6. Frekuensi Pelapor

Dalam PSAK ini mengatur bahwa Entitas diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan dalam satu periode (Tahunan).

7. Informasi Komperatif

Dalam penyusunan laporan keuangan entitas harus menyajikan perbandingan laporan keuangan tahun ini (periode berjalan) dengan tahun lalu (periode lalu).

8. Konsistensi Penyajian

Setiap penyusunan laporan keuangan harus konsisten dalam penyajian dan pengklasifikasian.

2.2.7. Pengelolaan Laporan Keuangan

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah terdapat dalam (Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005) bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor selama satu periode pelaporan. Pengelolaan keuangan Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan ,pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawan terhadap pengelolaan keuangan Daerah (Halim,2007:30).

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan Daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

kuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya.

2. *Value For Money*

Value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan Daerah dan anggaran Daerah.

3. Kejujuran dalam pengelolaan publik

Pengelolaan keuangan Daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi.

4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan Daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan Daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta Pemerintah Daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai.

2.3. Hubungan antar variabel penelitian

2.3.1. Hubungan Antara Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Menurut penelitian yang dilakukan Muhammad Alqodri (2015) dan Gerryan Putra (2017) menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

***H₁*: Akuntabilitas Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.**

2.3.2. Hubungan Antara Tranparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi keuangan telah menjadi kebutuhan warga dan telah mendapat perhatian Pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU17/2003), Indonesia secara formal telah berkomitmen untuk mengelola keuangan yang mengadopsi pilar-pilar utama tata Pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan. Komitmen Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi bahkan telah direalisir melalui penetapan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU14/2008). Walau komitmen dan ketentuan perundangan sudah ditetapkan untuk mengatur transparansi keuangan, masih banyak masalah dalam implementasi di lapangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqodri (2015) dan Gerryan Putra (2017) menemukan bukti empiris bahwa Transparansi keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh transparansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₂ : Transparansi Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3.3. Hubungan Antara Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen,

mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah selaku pengelola keuangan Daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Muhammad Alqodri (2015) memberikan bukti empiris pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah sementara penelitian yang berbeda dilakukan dalam penelitian Gerryan Putra (2017) memberikan bukti empiris variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh transparansi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₃: Pengawasan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan daerah.

2.3.4. Hubungan Antara Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan dari penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1 adalah memberikan informasi mengenai:

1. Posisi keuangan
2. Kinerja keuangan
3. Arus kas entitas

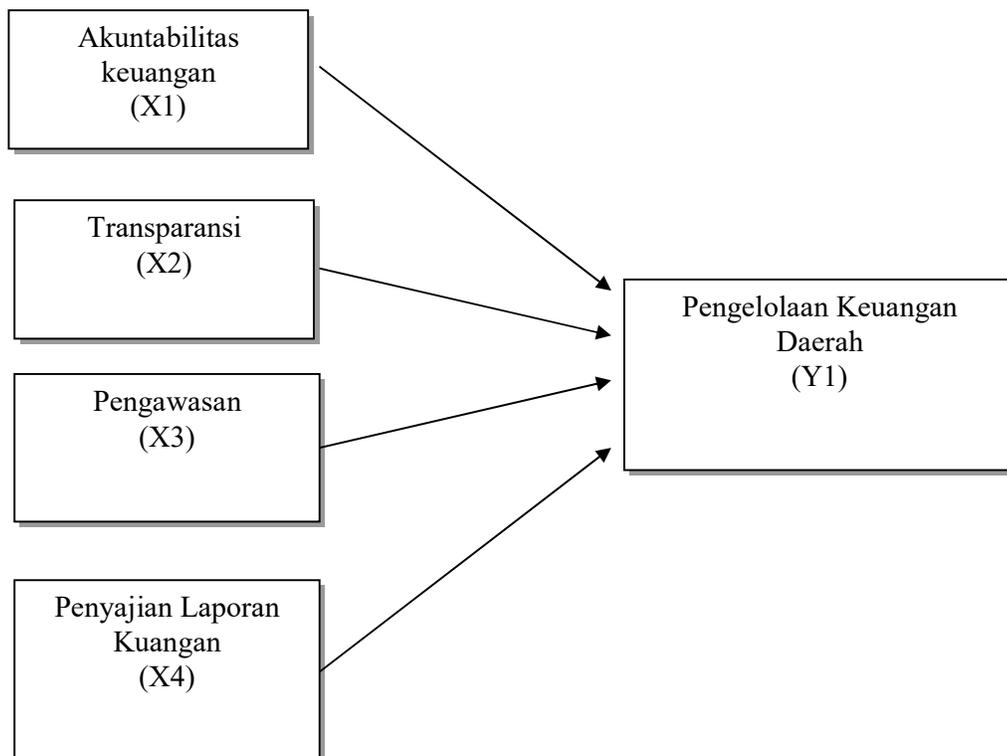
Laporan keuangan itu menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dari laporan keuangan pun dapat menunjukkan dan/atau menentukan apakah kinerja manajemen itu baik atau tidak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Alqodri (2015) dan Salomi J. Hehanussa (2015) menemukan bukti empiris bahwa Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan Daerah.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti menduga ada pengaruh penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H₄: Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian